

**KONSEP DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	Keterangan
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang	
2	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada ijin dari pengadu yang bersangkutan	
3	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht)	
4	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 PP-No-61-Tahun-2010	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Permanen Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	
5	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h PP-No-61-Tahun-2010	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Permanen Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	Keterangan
			DIBUKA	DITUTUP		
6	Rincian informasi terkait nomor rekening dan metodologi pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP PP No 61 Tahun 2010	Mengakibatkan terjadinya permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak dan penyerahan berkas	Tidak masuk dalam Informasi yang dikecualikan
7	Daftar user dan password pada server dan aplikasi pengadaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP PP No 61 Tahun 2010 UU No 11 Tahun 2008 PP PTSE No. 82 Tahun 2012	Mengakibatkan terjadinya permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	melindungi dan mengamankan perangkat data dan keamanan data	Permanen	Tidak masuk dalam Informasi yang dikecualikan
8	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP PP No 61 Tahun 2010 UU No 17 Tahun 2003 Permendagri No 13 Tahun 2006	Penyalahgunaan dokumen negara	Membantu kelancaran proses pemeriksaan/audit	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK keluar	Tidak masuk dalam Informasi yang dikecualikan
9	SK dan Data Penerima Bantuan/Hibah Pendidikan Keagamaan dan Hibah Keagamaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai bahan untuk mencari keuntungan sepihak	Mengurangi penyalahgunaan	1 tahun	Tidak masuk dalam Informasi yang dikecualikan

Menyetujui,
Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu Setda


 EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196505041988031014